

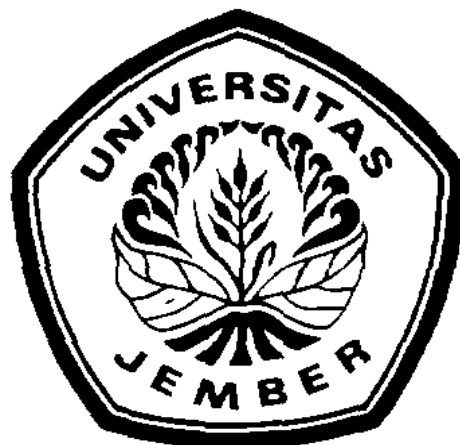
**OTONOMI DAERAH
& DESENTRALISASI**

**LAPORAN PENELITIAN
HIBAH STRATEGIS NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2012**

**STUDI PERBANDINGAN EFISIENSI SISTEM
PENGALANGAN PAJAK DAERAH DI PROVINSI JAWA
TIMUR DALAM PERIODE SEBELUM DENGAN
SETELAH PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**

DISUSUN OLEH:

**ATI KUSMIATI, SP., MP.
AGUS SUPRIONO, SP., M.Si.
DR. AHMAD ROZIQ, SE., MM., Ak.
Drs. MOCHAMAD SYAHARUNDIN, M.Si.**



**UNIVERSITAS JEMBER
DESEMBER, 2012**

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
STRATEGIS NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2012**

1. Judul Penelitian : Studi Perbandingan Efisiensi Sistem Penggalangan Pajak Daerah di Provinsi Jawa Timur dalam Periode Sebelum dengan Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah
2. Tema : Otonomi Daerah dan Desentralisasi
3. Ketua Peneliti :
 - a. Nama Lengkap : Ati Kusmiati, SP., MP.
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP : 197809172002122001
 - d. Jabatan Struktural : Ketua Laboratorium Sosiologi Pertanian, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor
 - f. Perguruan Tinggi : Universitas Jember (Unej)
 - g. Fakultas/Jurusan : Fakultas Pertanian/Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis
 - h. Pusat Penelitian : Lembaga Penelitian Universitas Jember
 - i. Alamat Kantor : Jl. Kalimantan No. 37 Jember
 - j. Telp./Fax. : (0331) 337818, 339385/(0331) 337818
 - k. Alamat Rumah : Jl. Tawangmangu V/No. 196
 - l. Telp./Fax./e-mail : 081336122164/ati.faperta@unej.ac.id
 - m. Anggota Peneliti : (1) Agus Supriono, SP., M.Si.
(2) DR. Ahmad Roziq, SE., MM., Ak.
(3) Drs. Mochamad Syaharudin, M.Si.
4. Jangka Waktu Penelitian : 1 Tahun
5. Pembiayaan : Rp. 80.000.000,-
(*Delapan Puluh Juta Rupiah*)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Jember**

Jember, 20 Desember 2012

Ketua Peneliti,

**DR. Ir. Jani Januar, MT.
NIP. 195901021988031002**

**Ati Kusmiati, SP., MP.
NIP. 197809172002122001**

**Mengetahui,
Kepala Lembaga Penelitian Univ. Jember**

**Prof. Ir. Achmad Subagio, M.Agr., Ph.D.
NIP. 196905171992011001**

ABSTRAK

Kasus *moral hazard* mega skandal penggelapan pajak yang dilakukan oleh Gayus Tambunan telah menghebohkan negeri ini. Kejadian ini pada akhirnya dapat membuka tabir bahwa sistem penggalangan pajak yang selama ini diterapkan di negeri ini cenderung 'kurang/tidak efisien' guna menanggulangi 'celah-celah kebocoran'. Kemunculan kasus ini pada akhirnya membawa banyak pihak juga semakin ragu akan kondisi efisiensi sistem penggalangan pajak di tingkat daerah. Terbukti kasus-kasus penggelapan pajak daerah (*regional tax*) juga terungkap banyak terjadi di sejumlah provinsi, termasuk diantaranya di Provinsi Jawa Timur. Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: (a) bagaimana kondisi efisiensi sistem penggalangan pajak daerah yang diterapkan di masing-masing kabupaten/kota, (b) permasalahan-permasalahan mendasar yang melingkupi kondisi ketidak-efisienan sistem penggalangan pajak daerah, (c) kemungkinan solusi-solusi atas permasalahan yang melingkupi kondisi ketidak-efisienan sistem penggalangan pajak daerah, (d) faktor internal dan eksternal kunci yang melingkupi lingkungan solusi, di Provinsi Jawa Timur baik pada periode sebelum maupun setelah pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan akhirnya (utama) penelitian adalah merumuskan *grand strategy* kebijakan atau strategi kebijakan alternatif yang dapat dipandang tepat (efektif dan efisien) guna meningkatkan efisiensi sistem penggalangan pajak daerah di Provinsi Jawa Timur, pada khususnya di era onomi daerah dewasa ini. Paradigma penelitian adalah kuantitatif dan kualitatif. Data yang dipergunakan data sekunder dan primer. Metode pengumpulan data primer dengan menggunakan *indept interview* dan *focus group discuson* (FGD). Pendekatan analisis yang dipergunakan adalah: (a) *tax revenue-income elasticity*, (b) deskriptif, (c) *logical frame work analysis* (LFA), (d) matriks evaluasi faktor inernal dan eksternal, serta (e) *grand strategy* interaksi SWOT.

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Khusus	2
1.3 Urgensi Penelitian	3
1.3.1 Urgensi Akademik	3
1.3.2 Urgensi Kebijakan	3
1.3.3 Urgensi Praktis	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Penelitian Terdahulu	4
2.2 Definisi Pajak (<i>Tax</i>).....	6
2.3 Definisi Pajak Daerah (<i>Regional Tax</i>).....	7
2.4 Teori <i>Tax Revenue-Income Elasticity</i>	8
2.5 Penerapan Teori <i>Tax Revenue-Income Elasticity</i> pada Kasus Perpajakan Daerah (<i>Regional Tax</i>)	10
III. MANFAAT PENELITIAN	13
3.1 Manfaat Akademis	13
3.2 Manfaat Kebijakan	13
IV. METODOLOGI PENELITIAN	15
4.1 Paradigma Penelitian	15
4.2 Daerah Penelitian	15
4.3 Data dan Metode Pengumpulan Data	16
4.4 Pendekatan Analisis	17
4.4.1 Analisis <i>Tax Revenue-Income Elasticity</i>	17
4.4.2 Analisis Deskriptif	19
4.4.3 <i>Logical Frame Work Analysis</i> (LFA)	20
4.4.4 Analisis Matriks Evaluasi Faktor Internal dan Eksternal	22
4.4.5 Analisis <i>Grand Strategy</i> Interaksi SWOT	26
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	31
5.1 Perkembangan Nilai Penerimaan Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Pembentuk PAD di Propinsi Jawa Timur Sebelum Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Tingkat Pertumbuhannya	32

5.1.1	Perkembangan Nilai Penerimaan Pajak Daerah di Propinsi Jawa Timur dan Tingkat Pertumbuhannya Sebelum Pelaksanaan Otonomi Daerah	34
5.1.2	Perkembangan Nilai Penerimaan Retribusi Daerah di Propinsi Jawa Timur dan Tingkat Pertumbuhannya Sebelum Pelaksanaan Otonomi Daerah	36
5.1.3	Perkembangan Nilai Penerimaan Laba BUMD di Propinsi Jawa Timur dan Tingkat Pertumbuhannya Sebelum Pelaksanaan Otonomi Daerah	37
5.1.4	Perkembangan Nilai Penerimaan Pendapatan Dinas-Dinas di Propinsi Jawa Timur dan Tingkat Pertumbuhannya Sebelum Pelaksanaan Otonomi Daerah	38
5.1.5	Perkembangan Nilai Penerimaan Pendapatan Lain-lain yang Sah di Propinsi Jawa Timur dan Tingkat Pertumbuhannya Sebelum Pelaksanaan Otonomi Daerah	40
5.2	Peranan Jenis-Jenis Sumber Penerimaan PAD Terhadap Pembentukan PAD Propinsi Jawa Timur Sebelum pelaksanaan Otonomi Daerah	41
5.2.1	Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pembentukan PAD Propinsi DKI Jakarta Sebelum Pelaksanaan Otonomi Daerah	42
5.2.2	Tingkat Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pembentukan PAD Propinsi Jawa Timur Sebelum Pelaksanaan Otonomi Daerah	43
5.2.3	Tingkat Kontribusi Penerimaan Pendapatan Lain-Lain yang Sah Terhadap Pembentukan PAD Propinsi Jawa Timur Sebelum Pelaksanaan Otonomi Daerah	44
5.2.4	Tingkat Kontribusi Penerimaan Pendapatan dari Dinas-Dinas Terhadap Pembentukan PAD Propinsi Jawa Timur Sebelum Pelaksanaan Otonomi Daerah	47
5.2.5	Tingkat Kontribusi Penerimaan Pendapatan Laba BUMD Terhadap Pembentukan PAD Propinsi Jawa Timur Sebelum Pelaksanaan Otonomi Daerah	48
5.3	Gambaran Perkembangan Tingkat Kontribusi Jenis-Jenis Sumber Penerimaan PAD Terhadap Pembentukan PAD Propinsi Jawa Timur Sebelum pelaksanaan Otonomi Daerah	49
5.4	Perkembangan Nilai Penerimaan Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Pembentuk PAD di Propinsi Jawa Timur Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Tingkat Pertumbuhannya	55
5.4.1	Perkembangan Nilai Penerimaan Pajak Daerah di Propinsi Jawa Timur dan Tingkat Pertumbuhannya Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah	56
5.4.2	Perkembangan Nilai Penerimaan Retribusi Daerah di Propinsi Jawa Timur dan Tingkat Pertumbuhannya Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah	57

5.4.3	Perkembangan Nilai Penerimaan Laba BUMD di Propinsi Jawa Timur dan Tingkat Pertumbuhannya Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah	58
5.4.4	Perkembangan Nilai Penerimaan Pendapatan Dinas-Dinas di Propinsi Jawa Timur dan Tingkat Pertumbuhannya Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah	59
5.4.5	Perkembangan Nilai Penerimaan Pendapatan Lain-Lain yang Sah di Propinsi Jawa Timur dan Tingkat Pertumbuhannya Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah	60
5.5	Peranan Jenis-Jenis Sumber Penerimaan PAD Terhadap Pembentukan PAD Propinsi Jawa Timur Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah	61
5.6	Keterkaitan Antara Perkembangan Penerimaan PAD dan Pungutan Daerah (Pajak dan Retribusi Daerah) dengan PDRB Propinsi Jawa Timur, Periode Tahun 1983 s/d 2003	67
5.6.1	Keterkaitan Antara Perkembangan Penerimaan PAD dengan Perkembangan PDRB di Propinsi Jawa Timur, Periode Tahun 1983 s/d 2003	67
5.6.2	Keterkaitan Antara Perkembangan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah (Pungutan Daerah) dengan Perkembangan PDRB di Propinsi Jawa Timur, Periode Tahun 1983 s/d 2003..	70
VI.	KESIMPULAN DAN SARAN	75
6.1	Kesimpulan	75
6.2	Saran	81
	DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
2.1	Hasil Penelitian Supriono (2004) di Lingkup Wilayah Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur	6
2.2	Pengambilan Keputusan Terhadap Hasil Analisis <i>Revenue-Tax Income Elasticity</i> di Suatu Negara	10
2.3	Pengambilan Keputusan Terhadap Hasil Analisis <i>Revenue-Tax Income Elasticity</i> di Suatu Daerah	11
4.1	Penentuan Sampel Kabupaten/Kota di Masing-Masing Bakorwil di Wilayah Provinsi Jawa Timur	16
4.2	Kriteria Pengambilan Keputusan Terhadap Hasil Analisis <i>Revenue-Tax Income Elasticity</i>	18
4.3	Interpretasi Pengambilan Keputusan Terhadap Hasil Analisis <i>Revenue-Tax Income Elasticity</i>	18
4.4	Beberapa Prinsip-Prinsip yang Harus Dipenuhi pada Pelaksanaan LFA	20
4.5	Matriks Evaluasi Faktor Internal (EFI)	23
4.6	Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE)	25
4.7	Menentukan Strategi Terpilih dalam Analisis <i>Grand Strategy</i>	27
5.1	Nilai Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, Pendapatan Dinas-Dinas, Pendapatan Lain-Lain yang Sah dan PAD di Propinsi Jawa Timur, dalam Periode Sebelum Pelaksanaan Otonomi Daerah (Tahun 1983 s/d 1999)	33
5.2	Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, Pendapatan Dinas-Dinas dan Pendapatan Lain-Lain yang Sah di Propinsi Jawa Timur, dalam Periode Sebelum Pelaksanaan Otonomi Daerah (Tahun 1983 s/d 1999)	34
5.3	Tingkat Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, Pendapatan Dinas-Dinas dan Pendapatan Lain-Lain yang Sah Terhadap Pembentukan PAD di Propinsi DKI Jakarta, dalam Periode Sebelum Pelaksanaan Otonomi Daerah (Tahun 1983 s/d 1999)	41

5.4	Nilai Rata-Rata Tingkat Kontribusi Sumber Penerimaan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, Dinas-Dinas dan Lain-Lain yang Sah Terhadap Pembentukan PAD Propinsi DKI Jakarta, per Periode tahun dalam periode Sebelum Pelaksanaan Otonomi Daerah (Tahun 1983 s/d 1999)	50
5.5	Nilai Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, Pendapatan Dinas-Dinas, Pendapatan Lain-Lain yang Sah dan PAD di Propinsi Jawa Timur, dalam Periode Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah (Tahun 2000 s/d 2003)	55
5.6	Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, Pendapatan Dinas-Dinas dan Pendapatan Lain-Lain yang Sah di Propinsi Jawa Timur, dalam Periode Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah (Tahun 2000 s/d 2003)	56
5.7	Tingkat Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, Pendapatan Dinas-Dinas dan Pendapatan Lain-Lain yang Sah Terhadap Pembentukan PAD di Propinsi Jawa Timur, dalam Periode Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah (Tahun 2000 s/d 2003)	61
5.8	Hasil Analisis Regresi <i>Double Log</i> Keterkaitan Antara Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Timur, Periode Tahun 1983 s/d 2003	68
5.9	Hasil Analisis Regresi <i>Double Log</i> Keterkaitan Antara Perkembangan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah (Pungutan Daerah) dengan Perkembangan PDRB Propinsi Jawa Timur, Tahun 1983 s/d 2003	71

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal.
4.1	Skema Interaksi SWOT dalam Analisis <i>Grand Strategy</i>	26
4.2	Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) Penelitian	30
5.1	Perkembangan Nilai Rata-Rata Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pembentukan PAD Propinsi Jawa Timur per Periode Tahun, dalam Periode Sebelum Pelaksanaan Otonomi Daerah (Tahun 1983 s/d 1999)	51
5.2	Perkembangan Nilai Rata-Rata Tingkat Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pembentukan PAD Propinsi Jawa Timur per Periode Tahun, dalam Periode Sebelum Pelaksanaan Otonomi Daerah (Tahun 1983 s/d 1999)	52
5.3	Perkembangan Nilai Rata-Rata Tingkat Kontribusi Laba BUMD Terhadap Pembentukan PAD Propinsi Jawa Timur per Periode Tahun, dalam Periode Sebelum Pelaksanaan Otonomi Daerah (Tahun 1983 s/d 1999)	53
5.4	Perkembangan Nilai Rata-Rata Tingkat Kontribusi Pendapatan Dinas-Dinas Terhadap Pembentukan PAD Propinsi Jawa Timur per Periode Tahun, dalam Periode Sebelum Pelaksanaan Otonomi Daerah (Tahun 1983 s/d 1999)	54
5.5	Perkembangan Nilai Rata-Rata Tingkat Kontribusi Pendapatan Lain-Lain yang Sah Terhadap Pembentukan PAD Propinsi Jawa Timur per Periode Tahun, dalam Periode Sebelum Pelaksanaan Otonomi Daerah (Tahun 1983 s/d 1999)	55
5.6	Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pembentukan PAD Propinsi Jawa Timur, dalam Periode Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah (Tahun 2000 s/d 2003)	62
5.7	Tingkat Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pembentukan PAD Propinsi Jawa Timur, dalam Periode Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah (Tahun 2000 s/d 2003)	63
5.8	Tingkat Kontribusi Penerimaan Pendapatan Lain-Lain yang Sah Terhadap Pembentukan PAD Propinsi Jawa Timur, dalam Periode Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah (Tahun 2000 s/d 2003)	64

5.9	Tingkat Kontribusi Penerimaan Laba BUMD Terhadap Pembentukan PAD Propinsi Jawa Timur, dalam Periode Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah (Tahun 2000 s/d 2003)	65
5.10	Tingkat Kontribusi Penerimaan Pendapatan Dinas-Dinas Terhadap Pembentukan PAD Propinsi Jawa Timur, dalam Periode Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah (Tahun 2000 s/d 2003)	66